**PENGARUH SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH
(SAPD) TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) PADA
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BUTON**

Lia Hanifa

*Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi,
Universitas Muhammadiyah Buton, Jl. Betoambari No. 36 Baubau.
E-mail: ipa.hanifa@gmail.com*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton, Pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner . Analisis data menggunakan Analisis Regresi Sederhana. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton. Dapat diindikasikan, bahwa peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) sudah baik dimana pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton secara umum sedang. Hasil penelitian diperoleh bahwa sebagian besar responden sangat setuju untuk melakukan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton yang pada akhirnya akan meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton.

Kata kunci: SAPD, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP)

Abstract

This paper intent to know Governance Accounting System influence Region (SAPD) To Akuntabilitas is Local Government Institution Performance (AKIP) On Regency Region secretariat Buton, Data collecting did by kuesioner's method. Analyzed is data utilizes Analyzed Simple Regression. Region Governance accounting system (SAPD) having for to Akuntabilitas is Local Government Institution Performance (AKIP) on regency Region secretariat upaten Buton. Can be betokened, that step-up Akuntabilitas is Local Government Institution Performance (AKIP) was good where performing Region Governance accounting system (SAPD) on regency Region secretariat upaten Buton in common target be. Acquired obseroational result that largely responder so okay to do Region Governance accounting system (SAPD) on regency Region secretariat upaten Buton one that on will increase Akuntabilitas is Local Government Institution Performance (AKIP) on regency Region secretariat upaten Buton.

Keyword: SAPD, Akuntabilitas is Local Government Institution Performance (AKIP)

Lia Hanifa, Pengaruh Sistem Akuntansi...

1. Pendahuluan

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitikberatkan pada pemerintah daerah. Selain itu, maraknya globalisasi yang menuntut daya saing disetiap Negara juga menuntut daya saing disetiap pemerintah daerahnya. Daya saing pemerintah daerah ini diharapkan akan tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintah daerah yang dapat diraih melalui adanya otonomi daerah.

Undang - undang No. 32 tahun 2004 sebagai pengganti Undang - Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang - Undang No. 33 tahun 2004 sebagai pengganti Undang - Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Otonomi Daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah itu sendiri. Dengan adanya otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah sendiri. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan sistem akuntansi yang baik, karena sistem akuntansi merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang *accountable*, dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Adapun manfaat penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan adalah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keaandalan pengelola

keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah. Perbedaan penerapan sistem akuntansi pada masa pra reformasi dan sistem yang baru adalah sistem akuntansi penatausahaan keuangan daerah yang berlaku pada masa lalu dan saat ini tercermin dalam perhitungan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) menggunakan sistem pembukuan tunggal yang berbasis kas. Prinsip basis kas adalah mengakui pendapatan pada saat diterimanya kas dan mengakui belanja atau biaya pada saat dikeluarkannya kas. Hal tersebut tentu saja sangat terbatas, karena informasi yang dihasilkan hanya berupa kas yang terdiri dari informasi kas masuk, kas keluar, dan saldo kas. Dengan demikian reformasi akuntansi pemerintahan di Indonesia adalah perubahan *single entry* menjadi *double entry*. *Single entry* pada awalnya digunakan sebagai dasar pembukuan dengan alasan utama demi kemudahan dan kepraktisan. Seiring dengan tingginya tuntutan perwujudan *good public governance*, perubahan tersebut dipandang sebagai solusi yang mendesak untuk diterapkan karena pengaplikasian *double entry* dapat menghasilkan laporan keuangan yang lengkap dan *auditable*. Sebagaimana diuraikan diatas maka diperlukan pengembangan atas sistem akuntansi yang baru, yaitu :

- a. Pengembangan sistem pembukuan berganda (*Double Entry*), dimana setiap transaksi dicatat dengan jurnal berpasangan, yaitu sisi debit dan sisi kredit.
- b. Penggunaan basis akrual (*Accrual Basis*) dengan mengembangkan prinsip dan asumsi bahwa pencatatan transaksi keuangan tidak hanya dilakukan pada saat terjadi penerimaan dan pengeluaran uang.

Dan semakin menguatnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi

Lia Hanifa, Pengaruh Sistem Akuntansi...

pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. berkenaan dengan hal tersebut, penciptaan akuntabilitas *public* harus dilaksanakan dalam akuntansi pemerintahan untuk dapat menciptakan *good governance*. *Good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik dimana penyelenggaraan manajemen pembangunan yang bertanggungjawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik maupun *administrative*, dan menjalankan disiplin anggaran.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita - citanya, ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Selain penerapan pada sistem akuntansi pemerintah daerah dan akuntabilitas, ketaatan pada peraturan perundangan juga merupakan elemen penting yang secara langsung berkaitan dengan kinerja instansi pemerintah. Dengan adanya hal ini diharapkan laporan akuntabilitas yang dihasilkan akan tepat dan sesuai dalam rangka pemenuhan kewajiban terhadap pemerintah pusat dan kebutuhan informasi publik.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap daerah tentunya berbeda - beda. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan diatas, beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut adalah penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, akuntabilitas keuangan, ketaatan pada peraturan perundangan. Sebagai contoh, jika SDM yang bekerja disebuah instansi pemerintahan daerah yang memiliki kemampuan dan keahlian dibidangnya, maka akan diperkirakan Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dihasilkan setiap Instansi Pemerintah daerah (Pemda) pun semakin maksimal.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton.

Berdasarkan hasil audit yang telah disampaikan Kabupaten Buton mendapat opini "Wajar Dengan Pengecualian (WDP)". LHP (Laporan Hasil Pengauditan) tersebut, temuan Sistem Pengendalian Intern pada LHP (Laporan Hasil Pengauditan) atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2012 adalah terdapat beberapa temuan. Sedangkan total temuan LHP (Laporan Hasil Pengauditan) atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang - undangan pada Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2012 terdapat beberapa temuan, dan yang material antara lain : (1) pembayaran honor dan transport kepada peserta bukan unsur MUSPIDA pada kegiatan rapat koordinasi unsur MUSPIDA dimana merugikan keuangan daerah serta biaya akomodasi penginapan hotel dan konsumsi peserta rapat koordinasi unsur MUSPIDA memboroskan keuangan negara, dan (2) terdapat kelebihan bayar biaya pemungutan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) tahun. Hal ini menimbulkan dampak negatif kepercayaan publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Buton. Pemerintah harus dapat menjadikan ini sebagai pembelajaran atas kinerja yang menjadi tanggungjawab mereka dalam proses akuntabilitas. Sehingga nantinya ini akan menjadi bahan evaluasi untuk pemerintah kabupaten Buton dimasa akan datang.

Sekretariat Daerah Kabupaten Buton dalam menerapkan sistem akuntansi pemerintahan daerah dinilai masih sangat kaku, dimana belum menunjukkan akuntabilitas sesuai dengan amat undang undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu belum adanya transparansi dan akuntabilitas tentang penggunaan keuangan daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis

Lia Hanifa, Pengaruh Sistem Akuntansi...

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai, "Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton".

2. Metode Penelitian

Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Jalan Takawa Gedung A Pasarwajo Provinsi Sulawesi Tenggara.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton. Sampelnya diambil dengan teknik *Simple Random Sampling* yaitu 45 responden yaitu pegawai Sekretariat Daerah Kab. Buton.

Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- Data Kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk pertanyaan atau kalimat-kalimat seperti jawaban kuisisioner oleh pegawai pada Sekretariat Daerah Kab. Buton.
- Data Kuantitatif yaitu data berupa angka-angka yang dinyatakan dalam berbagai satuan seperti jumlah pegawai pada Sekretariat Daerah Kab. Buton.

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah :

- Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari pegawai Pada Sekretariat Daerah Kab. Buton.
- Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui internet, buku yang berkaitan dengan penelitian.

Metode Pengumpulan Data

Didalam melengkapi hasil penelitian ini, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan cara berikut :

- Survey* Pendahuluan, yaitu kegiatan langkah awal untuk mencari judul skripsi dan masalah yang bisa diangkat menjadi bahan penelitian dengan membaca Jurnal.
- Studi Kepustakaan, yaitu metode untuk mendapatkan informasi dari teori-teori dengan cara mempelajari serta mencatat dari buku-buku literature, serta bahan-bahan informasi lainnya yang berhubungan dengan materi yang dibahas oleh penulis.
- Survey* Lapangan, yaitu suatu metode pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung ke tempat objek yang diteliti.
- Kuisisioner yaitu seperangkat pertanyaan yang disusun oleh peneliti untuk diisi oleh responden yang berbentuk pertanyaan tertulis.

Dalam penelitian ini digunakan *skala likert* lima point. *Skala likert* ini di gunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2007:86). Penentuan skala likert dapat di lihat sebagai berikut :

- Skor 5 = Sangat Setuju.
Skor 4 = Setuju.
Skor 3 = Cukup Setuju.
Skor 2 = Tidak Setuju.
Skor 1 = Sangat Tidak Setuju.

Metode Analisis Data

Untuk menjawab permasalahan yang di kemukakan dalam penelitian ini di gunakan analisis *regresi* Sederhana.

$$Y = \alpha + \beta X$$

Dimana: Y = Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP)

α = Konstanta (Nilai *intercept*)

β = Koefisien Regresi

Lia Hanifa, Pengaruh Sistem Akuntansi...

X = Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD)

ε = Estimasi tingkat kesalahan / Error

Dalam klasifikasi variabel di tentukan mana yang sebagai variabel bebas (*independent*) adalah Audit Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) (X), dan mana yang sebagai variabel terikat (*dependent*) adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) (Y) sedangkan variabel lain di luar kedua variabel tersebut dilambangkan dengan (ε) yang merupakan variabel - variabel yang tidak di ukur.

Untuk mengukur pengaruh variabel X terhadap variabel Y digunakan kaidah pengambilan keputusan yang di kemukakan oleh Toni (2010 : 107) sebagai berikut :

- Jika nilai $r > 0$ artinya telah terjadi hubungan linear yang positif yang berindikasikan bahwa makin besar nilai Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) (X), maka semakin besar pula Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) (Y), atau sebaliknya.
- Jika nilai $r < 0$ berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel X dan variabel Y
- Jika nilai $r = 1$ atau $r = -1$ artinya telah terjadi hubungan *linier* sempurna yaitu berupa garis lurus, sedangkan untuk nilai r yang makin mengarah ke angka 0 maka garis makin tidak lurus.
- Besarnya nilai yang di gunakan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan kaidah pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Sugiyono (2007 : 231) sebagai berikut :
Nilai $r = 0,00 - 0,199$ pengaruh yang terjadi tidak kuat
Nilai $r = 0,20 - 0,399$ pengaruh yang terjadi kurang kuat
Nilai $r = 0,40 - 0,599$ pengaruh yang terjadi sedang

Nilai $r = 0,60 - 0,799$ pengaruh yang terjadi kuat

Nilai $r = 0,80 - 1,00$ pengaruh yang terjadi sangat kuat

Untuk menentukan kecenderungan rata-rata skor jawaban responden, di gunakan kriteria interpretasi rata-rata skor kuisioner dengan skala liker seperti yang dikemukakan oleh Wijaya Toni (2010 : 132) Sebagai Berikut :

Nilai rata-rata skor 1,00-1,99 = Buruk Sekali

Nilai rata-rata skor 2,00 - 2,99 = Buruk

Nilai rata-rata skor 3,00 - 3,99 = Cukup Baik

Nilai rata-rata skor 4,00 - 4,99 = Baik

Nilai rata-rata skor sama dengan 5,00 = Baik Sekali

3. Pembahasan

Analisis Terhadap Skor Pernyataan

Variabel Independen (Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) (X))

Dari hasil kuisioner, total skor untuk Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) dapat dilihat dalam lampiran I dimana total skor Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) di bahwa total skor untuk dimensi ini adalah sebesar 1097 yang terdiri dari 5 item pertanyaan dari 45 responden yang berarti bahwa jika dirata-ratakan setiap responden dengan skor 4,87. Hal ini menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) yang ada adalah baik.

Variabel Dependent (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) (Y))

Dari hasil kuisioner, diperoleh total skor untuk Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP), dalam

Lia Hanifa, Pengaruh Sistem Akuntansi...

lampiran II diketahui bahwa total skor Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) di bahwa total skor untuk dimensi ini adalah sebesar 1108 yang terdiri dari 5 item pertanyaan dari 45 responden yang berarti bahwa jika dirata-ratakan setiap responden dengan skor 4.92. Hal ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) yang ada pada adalah baik.

Uji Hipotesis

Penelitian tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) diperoleh hasil penelitian dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana yang diuji dengan program SPSS 19 disajikan dalam lampiran III.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana dengan menggunakan SPSS 19 diperoleh persamaan regresi linear sederhana, pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) adalah:

$$Y = 0,422 + 0,973 X$$

Persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,765 dapat diartikan bahwa korelasi hubungan antara variabel bebas Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) (X) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) (Y) adalah positif.
2. Nilai koefisien determinasi (R²) = 0,585 dapat diartikan bahwa 58,5 % variasi dari peningkatan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) dipengaruhi oleh Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) (X) dan sisanya 41,5 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar model, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) terhadap Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) pengaruhnya kuat.

3. Estimase tingkat error variabel bebas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) = 3,090 menunjukkan angkat relatif kecil yang berarti mode regresi semakin akurat untuk memprediksi Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD).

Analisis Deskriptif Kuantitatif

Hasil analisis inferensial menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) dapat dilihat dari nilai signifikansi t pada analisis regresi sederhana yaitu sig t = 0,00 < a = 0,05. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Buton akan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton. Oleh karena itu, upaya peningkatan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) sangat diperlukan dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton.

Besarnya pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) dapat dilihat pada koefisien regresinya sebesar 0,575. Hal ini menunjukkan bahwa apabila terjadi perubahan dimensi Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) sebesar 1 satuan, maka akan menyebabkan perubahan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) sebesar 97,3 %.

Lia Hanifa, Pengaruh Sistem Akuntansi...

Berdasarkan uraian diatas, akan berlaku jika diasumsikan bahwa variabel bebas lainnya dalam penelitian ini dianggap tetap. Kenyataan ini dapat berindikasi bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) akan menyebabkan kecenderungan upaya peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) dengan asumsi variabel lainnya dianggap tetap.

4. Simpulan

Berdasarkan analisis yang digunakan guna menjawab masalah dan hipotesis dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) berpengaruh positif (kuat) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton. Dapat diindikasikan, bahwa peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) sudah baik dimana pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton secara umum berorientasikan Kuat. Hasil penelitian diperoleh bahwa sebagian besar responder sangat setuju untuk melakukan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton yang pada akhirnya akan meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton.

Daftar Pustaka

Agnestasia Laura Lumenta, Jenny Morasa, dan Lidia Mawikere, 2016 **Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Kabupaten Minahasa Selatan)**. Diterbitkan Oleh Jurnal

EMBA Vol.4 No.3 September 2016, Hal. 135-146.

ANDI. 2006, "**Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik**", Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol. 2, No. 1, hal 1-17.

Arikunto, Suharsimi. Prof. Dr, 2006, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek**, Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Bastari Imam, 2004, "**Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintah Sebagai Wujud Reformasi Manajemen Keuangan Daerah**, Jakarta.

Halim Abdul, 2004, "**Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah**", Jakarta: Salemba Empat.

Jusup, Al Haryono. Drs. M. B. A., Akuntansi, 2001, **Dasar-Dasar Akuntansi**, Yogyakarta : BPFE.

Lembaga Administrasi Negara (LAN), 2009, "**Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah**", Jakarta.

Nurul Fathia 2017, **Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Kinerja Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip) (Study Kasus Skpd Di Provinsi Riau)**. Diterbitkan Oleh JOM Fekon Vol. 4 No. 1 (Februari) 2017

Mardiasmo, 2002, "**Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah**", Yogyakarta: Buku Satu, Penerbit

N. Lapoliwa. Drs, Ak., Drs. Daniel S. Kuswandi, Ak., 2003, **Akuntansi Perbankan**, Jakarta : LPPI

SANG PENCERAH

Volume 4 Nomor 2, Agustus 2018, ISSN 2460-5697, Hlm. 70-77

Lia Hanifa, Pengaruh Sistem Akuntansi...

Nordiawan Deddi dan Hertianti Ayuningtyas, 2010, "**Akuntansi Sektor Publik**", Jakarta: Salemba Empat. Edisi Kedua.

Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 2006, "**Metodologi Penelitian Bisnis**", BPFE Yogyakarta: Edisi Pertama.

Riakhi, Ahmed dan Balkaoui, 2000, "**Teori Akuntansi**" Terjemahan Marwata, Haryanti Widiastuti, Jakarta: Salemba Empat

Rina yuniarti, 2014, **Pengaruh sistem akuntansi pemerintah dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota Bengkulu**. Diterbitkan Oleh Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Santoso, Ruddy Tri, 2007, **Prinsip Dasar Akuntansi Perbankan**, Yogyakarta : Andi Offset.

Supriyono, Bambang, 2002, "**Responsivitas dan Akuntabilitas Sektor Publik**".

Sugiyono, 2007, **Statistika Untuk Penelitian**, Penerbit CV. Alfabeta, Bandung.

Wijaya Tony, 2010, "**Cepat Menguasai SPSS 19: untuk olah & Interpretasi**" Yogyakarta: Cahaya Atma.

Arikunto, 1984, **Validitas dan realibitas**, FIP IKIP, Yogyakarta

Ralph Estes, Marianus Sinaga, & Nugroho Widjajanto, 1985, **Kamus Akuntansi Edisi Kedua**, Penerbit : Erlangga, Jakarta

Undang - Undang:

Inpres Nomor: 7 Tahun 1999 **Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**.

Undang - Undang RI Nomor: 32 Republik Indonesia Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah.

Undang - Undang RI Nomor: 33 Republik Indonesia Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) No.104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 106 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 107 Tahun 2000 Tentang Pinjaman Daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 110 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.